



# MOBILISASI SUMBER DAYA OMS KEHARUSAN UNTUK KEBERLANJUTAN OMS

PENGANTAR SERIAL DISUKSI  
PENTING DAN PERLUNYA MOBILISASI SUMBERDAYA OMS

Frans Toegimin  
Yayasan SPEAK Indonesia



“Masa depan tidak diramalkan atau diperkirakan – masa depan perlu dibentuk. Kita perlu membentuk masa depan kita sendiri...”

“Ruang sipil tidak pernah diberikan Cuma-Cuma, ruang sipil harus diperjuangkan – bahkan direbut...”

*(Yanuar Nugroho, Ph.D)*

# PROLOG

- ❑ Issue tentang mobilisasi sumber daya OMS – LSM merupakan issue lawas yang selalu *up to date* untuk keberlanjutan program dan organisasi
- ❑ Semua pegiat OMS sudah paham tentang penting dan perlunya mobilisasi sumber daya agar lembaganya tetap hidup dan kegiatan – program tetap berjalan
- ❑ Walaupun Lembaga – Organisasi “hanya” merupakan “*instrument*” untuk menjalankan program – kegiatan, tetapi perlu menjadi “*instrument*” yang akuntabel dan strategis untuk melakukan mobilisasi sumber daya dan untuk menjalankan program – kegiatan (*Lembaga seharusnya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan program yang dikelola*).
- ❑ Perlunya memperluas pemahaman strategi mobilisasi sumber daya yang lebih beragam , terlebih cara-cara yang lebih strategis

# REFLEKSI KONDISI CSO SAAT INI

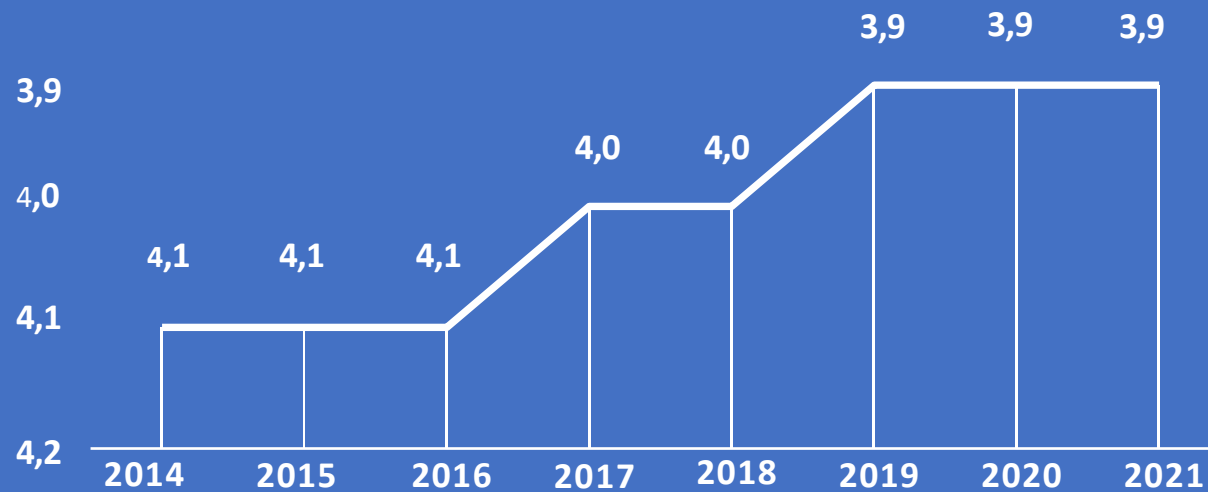
(Dari Berbagai Sumber)



- Hasil CSOSI Ideks – Konsil LSM Indonesia
- Hasil OCPAT YAPPIKA - Action Aid
- Hasil Indeks Demokrasi Indonesia – BAPPENAS
- Hasil Indonesia Civil Society Forum – ICS 2024

# INDONESIAN CSO-SI SCORE

**INDONESIAN CSOSI SCORE**  
*Years 2014-2021*



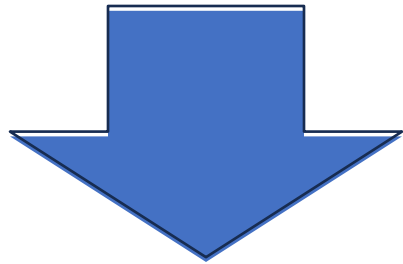
**INDONESIAN CSOSI SCORE**  
*Years 2019 - 2023*

| YEAR                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Legal Environment       | 4,4  | 4,6  | 4,7  | 4,8  |
| Organisational Capacity | 3,9  | 3,8  | 3,7  | 3,7  |
| Financial Viability     | 4,3  | 4,4  | 4,5  | 4,5  |
| Advocacy                | 3,2  | 3,2  | 3,1  | 3,0  |
| Service Provision       | 3,6  | 3,5  | 3,4  | 3,3  |
| Sectoral Infrastructure | 4,6  | 3,9  | 3,9  | 3,9  |
| Public Image            | 4,1  | 4,0  | 4,0  | 4,0  |
| TOTAL SCORE :           | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 3,9  |

# DIMENSI LINGKUNGAN HUKUM

## DIMENSI 1. LINGKUNGAN HUKUM: 4.8

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor  | 4,4  | 4,6  | 4,7  | 4,8  |

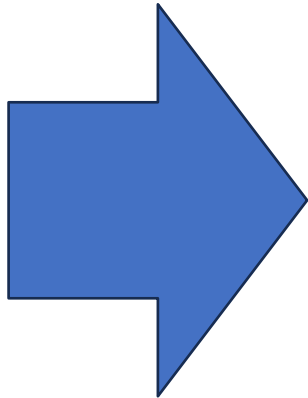


- ❑ Dampak beberapa kebijakan yang mempersempit ruang sipil: UU ITE, UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK.
- ❑ Pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan (Provinsi Lampung, Kabupaten Lima Puluh Kota).
- ❑ Kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis OMS mengalami penurunan akibat pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat negara (terutama polisi), maupun penggunaan beragam metode pembatasan untuk membungkam kritik, mulai dari intimidasi, labeling, kriminalisasi, dst. Kriminalisasi, intimidasi, kekerasan terhadap OMS dan aktivis OMS
- ❑ Amnesty Internasional juga mencatat terdapat 128 aktivis HAM yang ditangkap, 96 mengalami intimidasi/serangan fisik, 41 orang dikriminalisasi, 3 kasus percobaan pembunuhan, dan 1 kasus serangan terhadap lembaga pembela HAM.
- ❑ Komnas Perempuan juga menyebutkan dalam Laporan Tahunan 2023, bahwa tercatat 7 laporan kekerasan terhadap Perempuan pembela HAM.
- ❑ Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan di Karimun Jawa & Budi Pego di Banyuwangi.
- ❑ *Queer Advocacy Week* ASEAN batal diadakan di Jakarta pada 17-21 Juli 2023
- ❑ Homofobia mempengaruhi proses pendaftaran dan legalisasi OMS
- ❑ Rekognisi pemerintah melalui kebijakan pendanaan: BPD LH, DBH, Swakelola Tipe III.

# DIMENSI KEMAMPUAN KEUANGAN

## DIMENSI 3. KEMAMPUAN FINANSIAL: 4.5

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor  | 4,3  | 4,4  | 4,5  | 4,5  |



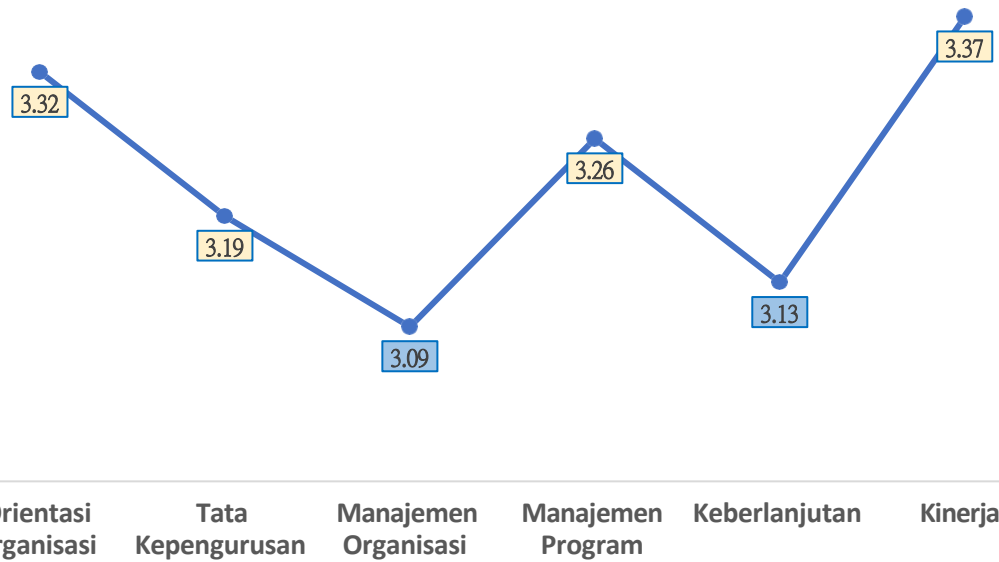
- ❑ Masih belum optimalnya upaya diversifikasi sumber pendanaan OMS.
- ❑ Penurunan dukungan pendanaan luar negeri, dan peningkatan posisi ekonomi Indonesia
- ❑ Sumber pendanaan lokal potensial seperti dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, ataupun sumber dari dana pemerintah juga belum maksimal diakses oleh OMS.
- ❑ Covid-19 dan penurunan dukungan lembaga internasional menstimulasi diversifikasi pendanaan dan kreativitas OMS. Survei: 361 dari 509 OMS (71%) sudah mulai memiliki diversifikasi pendanaan.
- ❑ Inovasi diversifikasi pendanaan mulai berkembang, namun belum significant:
  - Lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS telah terbuka untuk bekerjasama dengan OMS.
  - Kitabisa sudah bermitra dengan lebih dari 1,000 OMS, 290 RS, 150 CSR, 7 juta vendor..
  - LBH dan YAPPIKA secara mandiri melakukan model crowd-funding melalui website organisasi.
  - Kelompok serikat buruh/pekerja menginisiasi sistem iuran anggota dengan check out system, bekerja sama dengan Perusahaan untuk secara langsung menarik iuran dari gaji bulanan.
  - 32 organisasi lokal mitra USAID-MADANI, sampai dengan tahun 2023 berhasil mengembangkan alternatif sumber pendanaan local yang beragam, mulai dari skema Swakelola (pendanaan dari pemerintah), bisnis sosial, dan lainnya. Secara kolektif mengumpulkan 17 milyar rupiah.
  - Kota Kita, organisasi nirlaba dengan keahlian perencanaan kota dan partisipasi warga dalam perancangan dan pengembangan kota (Panduan Model Pendanaan yang Berkelanjutan bagi OMS HIV AIDS di Indonesia). Sampai tahun 2022 Kota Kita memiliki 9 sumber pendanaan, a.l; Private consulting, Research University, Private Foundation, International Public Corporation, Social Enterprise, International Research Organization, UN Agency.
  - Yayasan Kusuma Buana (YKB), salah satu OMS yang berfokus pada masalah kesehatan dengan mengutamakan upaya preventif dan promosi, memiliki sumber pendanaan lebih dari empat sumber, mulai dari donor, sector swasta, fundraising, pemerintah, dan individu.



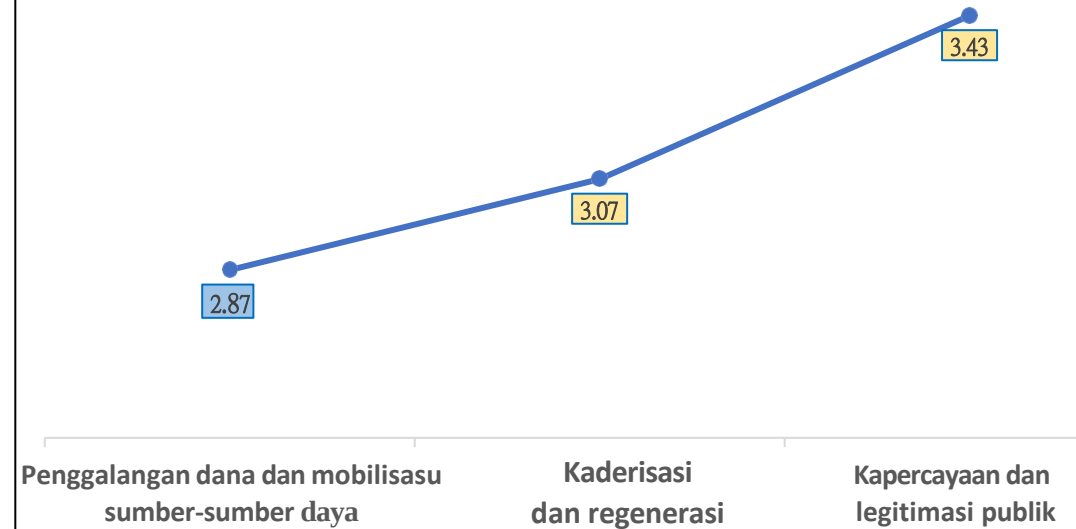
# KAPASITAS OMS

## Laporan YAPPIKA – Action Aid

Tingkat Kapasitas Organisasi Menggunakan OCPAT



Tingkat Kapasitas Komponen Keberlanjutan Menggunakan OCPAT



OCPAT - *Organizational Capacity and Performance Assessment Tools*. Dengan dukungan The Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society (AIPTIS) atau INKLUSI, YAPPIKA -ActionAid memperkenalkan tiga alat penilaian kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil – OMS. Rentang nilai paling rendah 0.00 dan paling tinggi– 4.00



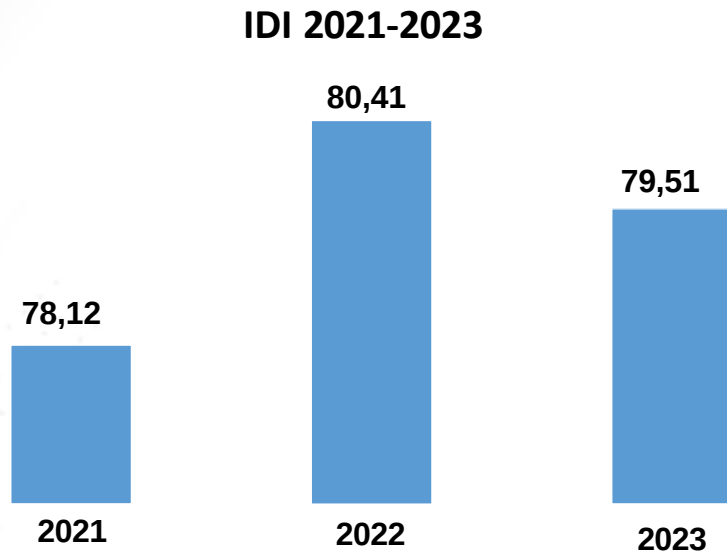
# Tantangan Kerangka Hukum Pengaturan OMS di Indonesia

- ☐ Paradigma Pemerintah Indonesia yang menganggap OMS adalah lebih sebagai ancaman dan bukan sebagai aktor demokrasi. Salah satu alasan pengesahan UU Ormas dari masa ke masa adalah meningkatnya ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik, keamanan nasional, dan moralitas masyarakat oleh organisasi-organisasi berbasis keagamaan
- ☐ Adanya hegemoni tafsir Ormas dari Pemerintah (sejak Orde Baru hingga Reformasi) dengan cara yang berbeda
- ☐ Mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT organisasi bagi yang telah kedaluwarsa
- ☐ Menjadikan SKT sebagai alat untuk pembatasan akses terhadap sumber daya
- ☐ Pengawasan yang berlebihan dengan pendekatan politik keamanan.
- ☐ Pembubaran OMS tanpa melalui proses peradilan melalui asas *contrarius actus* dan sanksi pidana bagi anggota/staf/pegiat OMS

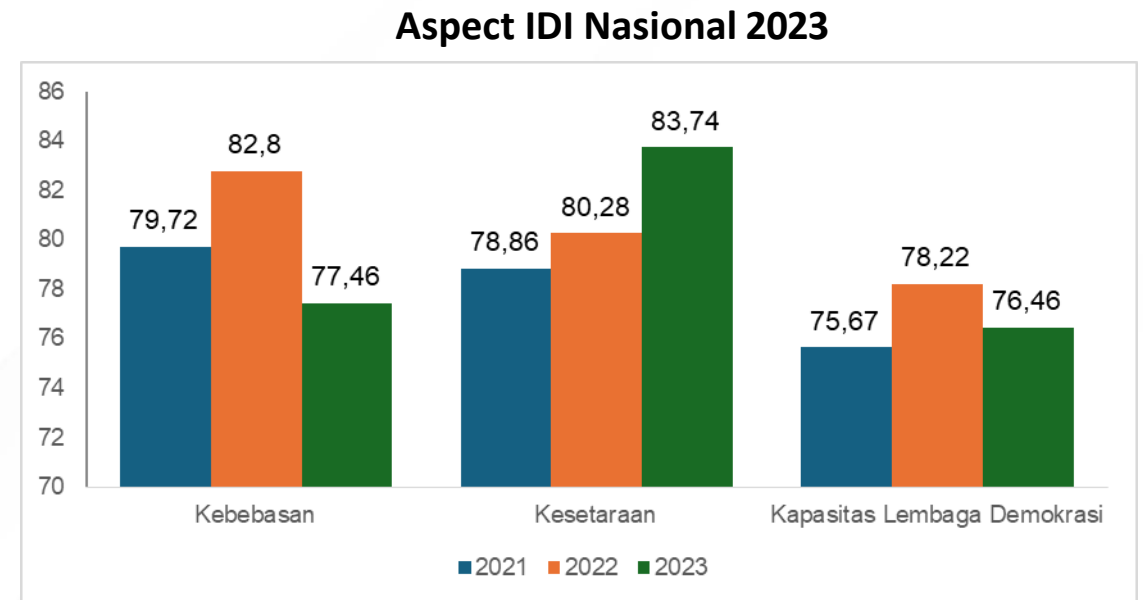
**Notes:** Azas yang menyatakan Badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya

# HASIL INDEK DEMOKRASI INDONESIA – IDI BAPPENAS

**BAPPENAS Report:** The narrowing - shrinking of civic space is reflected in the achievement of the 2023 **Indonesian Democracy Index (IDI)**. The 2023 national IDI with the score of 79.51 decreased by 0.9 points compared to the achievement in 2022 with the score of 80.41. In the 2023 national IDI, the **Freedom** aspect was the largest decline compared to the other two aspects (**Equality** aspect and **Democratic Institution Capacity** aspect), while the **Equality** aspect was the only aspect increased.



Sumber: BPS, 2024



Sumber: BPS, 2024

# GAMBARAN INDEK DEMOKRASI INDONESIA

| Indeks Demokrasi Indonesia<br>[Metode baru] | [Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat,<br>dan Provinsi |       |       |                   |       |       |                                      |       |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
|                                             | Aspek Kebebasan                                                                               |       |       | Aspek Kesenjangan |       |       | Aspek Kapasitas Lembaga<br>Demokrasi |       |       |
|                                             | 2023                                                                                          | 2022  | 2021  | 2023              | 2022  | 2021  | 2023                                 | 2022  | 2021  |
| Nasional*                                   | 77,48                                                                                         | 82,80 | 79,72 | 83,74             | 80,28 | 78,86 | 76,46                                | 78,22 | 75,67 |
| Pusat                                       | 74,32                                                                                         | 86,59 | 77,59 | 90,12             | 81,47 | 81,51 | 83,48                                | 85,39 | 84,80 |
| Provinsi**                                  | 79,50                                                                                         | 80,39 | 81,08 | 79,67             | 79,52 | 77,17 | 72,00                                | 73,66 | 69,86 |

Keterangan Data:

*Sumber Data:* Indeks Demokrasi Indonesia, dengan catatan : \* Nilai IDI Nasional merupakan nilai agregasi Propinsi dan Pusat. \*\* Nilai IDI Propinsi merupakan agregasi dari nilai 34 Propinsi.

# TEMUAN DARI ICSF REGIONAL

- Adanya keterbatasan partisipasi di ruang public, intimidasi / ancaman thd aktivis dan pembela HAM, dominasi patriarki dan hirarki, pengawasan ketat terhadap kerja OMS.
- Ruang partisipasi tidak berkontribusi nyata, representasi kelompok minoritas dan marginal sekedar simbolis, kesenjangan issue dengan perhatian pemerintah, minimnya ruang komunikasi dan sumber pendanaan.
- Rendahnya minat generasi muda untuk bergiat – bergabung dengan OMS, kekosongan figure pemimpin, keterbatasan akses teknologi bagi kelompok marginal
- Kurangnya SDM yang berpengalaman, dokumen pendukung yang tidak lengkap, kesulitan pendanaan yang berkelanjutan
- OMS disalahgunakan untuk issue politik, OMS dipandang sebagai mitra penting dalam issue sosial
- Menyempitnya ruang sipil - *the shrinking of civic space* (kecenderungan pemerintah yang anti-kritik, kecenderungan pelemahan peran kritis media, kembalinya pemerintahan 'rasa orde baru' → potensi kembalinya Dwi-fungsi ABRI → proses revisi UU TNI dan POLRI).
- Di akhir pemerintahan SBY (2014), score demokrasi elektoral Indonesia ada di angka 0,67. Angka kemudian menurun di sepanjang pemerintahan Joko Widodo: 0,6 di 2019 dan 0,54 pada 2023 (SMRC).



# MEMPERLUAS STRATEGI MOBILISASI SUMBERDAYA

- Meningkatkan Efektivitas *Engaged* → *Engagement* untuk Mobilisasi Sumber Daya
- *Mobilizing Support* untuk Mobilisasi Sumber Daya

# Memahami Strategi 'Engaged'

- Situasi di mana individu atau kelompok dari masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam dialog, kolaborasi, atau interaksi lain dengan pemerintah.
- Menunjukkan partisipasi yang konstruktif dan sering kali proaktif dalam berbagai proses seperti pembuatan kebijakan, pengawasan, dan implementasi program pemerintah.
- Keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dan efektif dianggap vital untuk demokrasi yang sehat karena meningkatkan responsivitas dan legitimasi pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan warga.

# Memahami Strategi 'Engaged'

## *Bagaimana 'being engaged'?*

- **Partisipasi dalam pengambilan keputusan:** terlibat dalam membahas dan memberikan masukan untuk kebijakan atau undang-undang yang sedang dirumuskan.
  - terlibat dalam konsultasi publik, forum diskusi
  - duduk sebagai perwakilan dalam badan/lembaga pengambil kebijakan.
- **Pengawasan dan akuntabilitas:** pemantauan terhadap aktivitas pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
  - audit sosial, pelaporan independent
  - media dan organisasi non-pemerintah mitra pemerintah.
- **Kolaborasi dalam implementasi program:** berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan program yang menargetkan kepentingan public.
  - pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
- **Advokasi dan lobbying:** terlibat mendorong perubahan kebijakan tertentu.
  - strategi komunikasi, kampanye
  - interaksi langsung dengan pembuat kebijakan.

# MOBILIZING SUPPORT – MOBILISASI DUKUNGAN



- *Mobilizing Support* - Mobilisasi Dukungan adalah proses yang sengaja dan sistematis untuk mempengaruhi **kebijakan, praktik, dan perilaku** berbagai pemangku kepentingan yang ditargetkan yang paling berpengaruh dalam isu tertentu, melibatkan penerima manfaat dan meningkatkan kepemilikan serta kapasitas mereka terkait isu tersebut.
- **Mobilisasi Dukungan** memiliki fokus utama pada implementasi peraturan, kebijakan, praktik, dan perilaku pemangku kepentingan yang berbeda.

# PRINSIP MOBILIZING SUPPORT : CLASP



**Credibilitas:** Mengapa orang percaya pada (program) Anda?

**Legitimasi:** Siapa atau apa yang memberi Anda hak untuk ikut campur? (stakeholder utama?, partisipasi penerima manfaat?)

**Akuntabilitas:** Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda kredibel dan sah? (bukti, transparansi dalam pengambilan keputusan dan konstituensi, arah ke atas dan ke bawah)

**Service Oriented :** Bagaimana Anda membantu – melayani penerima manfaat? (Ada transparansi? tepat waktu, tidak ingkar janji?, partisipatif?)

**Power:** Apa kekuatan Anda dan bagaimana Anda menggunakannya? (menggabungkan kekuatan, keahlian, keyakinan pada pesan – program yang disampaikan)

# MOBILISASI DUKUNGAN DAN TEORI PERUBAHAN - ToC

## *Kegiatan Layanan*

Penerima manfaat merasakan efek negatif dari suatu masalah sosial

Organisasi masyarakat sipil mengatasi masalah secara langsung

Penerima manfaat menikmati kondisi yang lebih baik

Penerima manfaat merasakan efek negatif dari suatu masalah sosial.

Organisasi Masyarakat Sipil mendapat dukungan

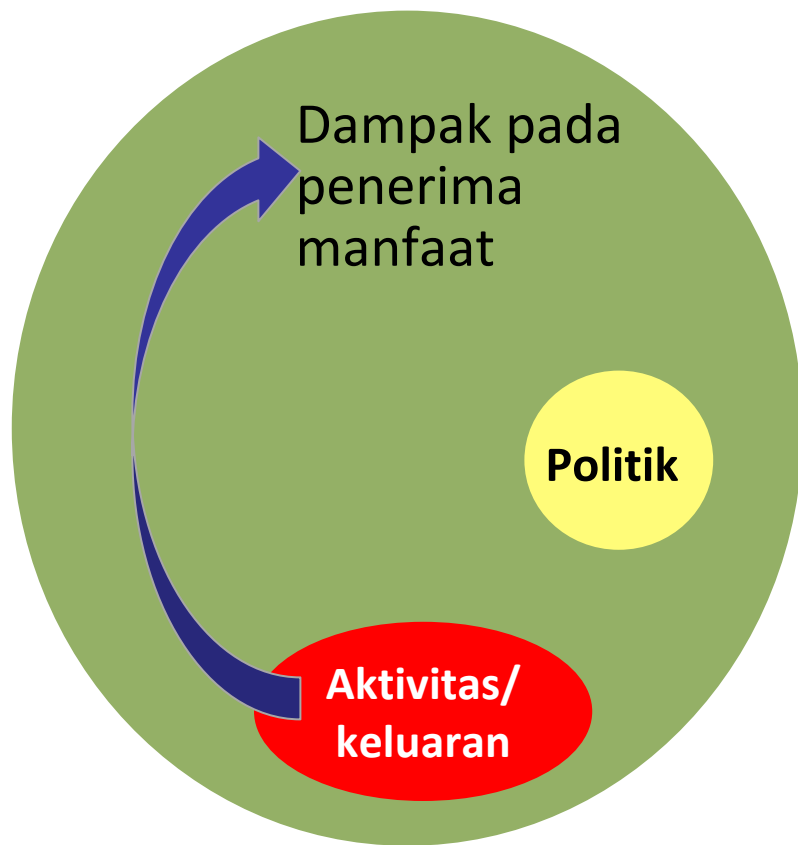
Lembaga Pemerintahan dan atau pemangku kepentingan lain mengubah perilaku

Keputusan diimplementasikan, komitmen dihargai

Penerima manfaat menikmati kondisi yang lebih baik (dalam masyarakat tempat mereka ikut membuat keputusan)

## *Mobilisasi Dukungan*

# KEGIATAN LAYANAN DAN MOBILISASI DUKUNGAN



# EPILOG



- ❑ Melihat berbagai fakta bahwa OMS menghadapi tantangan eksternal yang tidak semakin ramah, sementara OMS terus perlu berjuang untuk keberlanjutannya, maka OMS perlu terus mengembangkan strategi penggalangan - mobilisasi sumber daya yang semakin intensif.
- ❑ Untuk kebutuhan pada point di atas LOKADAYA akan membersamai para Anggota jaringannya untuk terus belajar bagaimana OMS dapat melakukan mobilisasi sumber daya secara efektif dengan menyelenggarakan serial DISKOL (diskusi online), dengan topik ;
  - Diversifikasi Sumber Daya dan Mitigasi Risiko Keberlanjutan
  - Strategi dan Teknik Mobilisasi Sumber Daya
  - Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan



*Terima Kasih*

